



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR



LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta target kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tahun 2021. Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Agama RI Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pada Kementerian Agama.

Penyusunan laporan kinerja merupakan wujud pelaksanaan *good governance* serta sekaligus pertanggungjawaban kepada publik

atas pencapaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Laporan Kinerja tahun 2021 ini menggambarkan data dan informasi terkait perkembangan realisasi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) sampai berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (PK). Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2021 ini diharapkan dapat menjadi pertanggungjawaban secara tertulis sekaligus dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan dalam perencanaan kegiatan yang akan datang sehingga terbentuk tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).



Akhir kata, kami menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2021 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Segala bentuk saran dan kritik yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi terlaksananya tugas dan fungsi Kementerian Agama dengan lebih baik.

Sidoarjo, 28 Januari 2022

Kepala Kantor Wilayah

Kementerian Agama Prov. Jawa Timur



Husnul Maram

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Sistematika Penyajian	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Rencana Strategis	9
B. Sasaran Kegiatan	10
C. Perjanjian Kinerja	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	42
A. Capaian Kinerja	42
B. Analisis Capaian Kinerja	53
C. Realisasi Anggaran	93
BAB IV Penutup	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jawa Timur merupakan provinsi yang terletak di sebelah timur pulau Jawa. Wilayah Provinsi Jawa Timur bagian utara berbatasan dengan Laut Jawa, bagian timur berbatasan dengan Selat Bali, bagian selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, dan bagian barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi 29 Kabupaten dan 9 Kota. Luas keseluruhan wilayah Provinsi Jawa Timur adalah 47.799,75 km². Kabupaten/Kota yang memiliki wilayah paling luas adalah Kabupaten Banyuwangi yaitu sekitar 5.782,4 km². Sedangkan yang memiliki luas paling kecil adalah Kota Mojokerto dengan luas wilayah 16,47 km².

Berdasarkan sensus penduduk tahun 2020, Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia dengan jumlah penduduk sebanyak 40.665.696 jiwa. Di Jawa Timur juga terdapat berbagai macam tempat ibadah, antara lain 42.687 masjid, 279.093 musholla, 2.749 gereja Protestan, 296 gereja Katolik, 455 Pura, 163 Vihara dan 21 Klenteng (sumber: BPS Jawa Timur, 2020).

Secara sosial-budaya, masyarakat Jawa Timur dapat dibagi ke dalam tiga kategori utama; Pertama, masyarakat Mataraman 45% (persen) yang mencakup wilayah Jawa Timur bagian barat seperti Tuban, Bojonegoro, Ngawi, Madiun, Kediri, Nganjuk, Magetan, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, hingga bagian selatan Kab. Malang, Lumajang dan Jember. Kedua, masyarakat Arek (20%) yang mencakup Lamongan, Gresik, Jombang, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo hingga Malang bagian utara. Ketiga, masyarakat Madura (30%) yang mencakup empat Kabupaten di Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep), Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, hingga bagian utara Jember dan Lumajang. Keempat, budaya Osing (5%) berada di Kabupaten Banyuwangi.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur merupakan instansi vertikal yang mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah provinsi Jawa Timur berdasarkan kebijakan

Menteri Agama dan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 19 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, susunan organisasi Kanwil Prov. Jatim terdiri atas:

1. Bagian tata usaha;
2. Bidang Pendidikan Madrasah;
3. Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren;
4. Bidang Pendidikan Agama Islam;
5. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
6. Bidang Urusan Agama Islam;
7. Bidang Penerangan Agama Islam, dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf;
8. Pembimbing Masyarakat Kristen;
9. Pembimbing Masyarakat Katolik;
10. Pembimbing Masyarakat Hindu;
11. Pembimbing Masyarakat Buddha; dan
12. Kelompok Jabatan Fungsional

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur memiliki kekuatan dengan jumlah ASN sebanyak 24.354 orang yang tersebar di berbagai satker baik di kanwil, di 38 Kankemenag kab/kota, maupun di KUA dan Madrasah. Di Jatim terdapat 664 Kantor Urusan Agama (KUA); 146 Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN); 183 Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN); dan 90 Madrasah Aliyah Negeri (MAN). Adapun untuk lembaga swasta terdapat 6.884 Raudhatul Athfal (RA); 7.099 Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS); 3.379 Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS); dan 1.602 Madrasah Aliyah Swasta (MAS). Untuk penyuluh agama di Jatim berjumlah total 6.270 orang penyuluh, yang terdiri dari 5.765 penyuluh agama Islam; 94 penyuluh agama Kristen; 151 penyuluh agama Katolik; 60 penyuluh agama Hindu; 185 penyuluh Buddha; dan 15 penyuluh agama Khonghucu.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur menganut asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang disebutkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan negara, di antaranya dalam UU RI No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Dalam Pasal 3 UU tersebut menyebutkan asas umum penyelenggaraan negara terdiri dari asas kepastian hukum, asas tertib

penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Asas akuntabilitas sendiri merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas kinerja yang merupakan garda depan menuju *good governance* berkaitan dengan bagaimana instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara untuk sebaik-baiknya pelayanan publik. Perubahan mindset dan culture-set penyelenggaraan birokrasi yang semula berorientasi kerja (*output*) menjadi berorientasi kinerja (*outcome*) merupakan titik berat dalam konsep akuntabilitas kinerja. Dalam rangka menjamin akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, telah dikembangkan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP tersebut kemudian diterapkan melalui pembuatan laporan kinerja yang menentukan target kinerja disertai dengan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan instansi pemerintah.

Menurut Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 94 tahun 2021 Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur

B. Sistematika Penyajian

Laporan kinerja ini bertujuan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama pada Tahun 2021, yaitu dengan melakukan analisis atas capaian kinerja (*performance results*) terhadap rencana kinerja (*performance plans*). Analisis tersebut memungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sebagai umpan balik perbaikan kinerja di masa datang. Sejalan dengan hal tersebut, sistematika penyajian laporan kinerja (LKj) adalah sebagai berikut:

- Bab I – Pendahuluan, menyajikan latar belakang penyusunan LKj

- Bab II – Rencana Strategis dan Sasaran Kinerja, menyajikan rencana strategis dan sasaran kinerja Tahun 2021.
- Bab III – Akuntabilitas Kinerja dan Realisasi Keuangan, menyajikan analisis terhadap capaian kinerja dan realisasi keuangan pada Tahun 2021
- Bab IV – Penutup, menyajikan simpulan terhadap pencapaian kinerja di tahun 2021.
- Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024 merupakan tindak lanjut atas terbitnya Renstra Kementerian Agama RI Tahun 2020-2024. Rencana Strategis Kementerian Agama (Renstra Kementerian Agama) disusun berdasarkan RPJMN tahun 2020-2024 dan berpedoman pada RPJPN tahun 2005-2025, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang Agama dan Pendidikan serta aspirasi masyarakat. Dalam proses penyusunannya, Renstra Kementerian Agama menggunakan metode dan kerangka berpikir yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024.

Renstra Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tahun 2020-2024 ini memuat visi, misi, tujuan, arah kebijakan, dan strategi Kementerian Agama selama 5 (lima) tahun mendatang yang fokus pada pencapaian RPJMN tahun 2020-2024. Renstra Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur ini telah mengacu pada 4 (empat) pilar RPJMN ke IV tahun 2020-2024, yang mana keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan Prioritas Nasional mulai dari Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Renstra Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tahun 2020-2024 agar menjadi rujukan utama dalam penyusunan Renstra serta acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur . Renstra Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur ini diharapkan dapat mendukung pencapaian program pemerintah pada sektor pembangunan bidang Agama dan Pendidikan tahun 2024.

Visi dan Misi

Visi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur mendukung Visi Kementerian Agama RI. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024 adalah: *“Kementerian Agama yang professional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, maju, yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong.”*

Adapun Misi yang ditetapkan Kementerian Agama Republik Indonesia ada 6 misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama;
2. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah, dan merata;
4. Meningkatkan layanan Pendidikan yang merata dan bermutu;
5. Meningkatkan produktivitas, dan daya saing Pendidikan; dan
6. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)

Tujuan

Tujuan Rencana Strategis Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2020-2024 menetapkan 6 (enam) tujuan, diantaranya sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial;
2. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;
4. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas;
5. Peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif;
6. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif

B. SASARAN KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan Kementerian Agama Republik Indonesia ditetapkan sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. Kementerian Agama menetapkan 13 sasaran strategis dalam rangka mencapai 6 (enam) tujuan. Sedangkan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur mendukung 11 Sasaran Strategis dan 16 Sasaran Program dari 5 (lima) tujuan yang dijalankan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam rangka mencapai 5 (lima) tujuan sebagaimana disebutkan diatas, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur menetapkan 54 Sasaran Kegiatan yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai dan menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur sampai pada tahun 2024.

Adapun Sasaran Kegiatan yang mendukung dan bersesuaian dengan Tujuan, Sasaran Strategis dan Sasaran Program sebagaimana tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

2.2.1 Peningkatan Kualitas Umat Beragama dalam Menjalankan Ibadah Ritual dan Sosial (Tujuan-1, 1 sasaran kegiatan)

Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial, merupakan tujuan pertama, akan dicapai dengan menetapkan 1 (satu) sasaran strategis dan sasaran program, sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS1	Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama (SP-1)-> (SS1)

Sasaran Kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Penyuluhan Agama, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Nilai kinerja penyuluh agama;
 - b. Persentase penyuluh agama yang dibina;
 - c. Jumlah penyiur agama yang dibina kompetensi;
 - d. Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan;

2.2.2 Penguatan Kualitas Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama (Tujuan-2, 13 sasaran kegiatan)

Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama akan dicapai dengan menetapkan 2 (dua) sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS2	Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama	1. Menurunnya frekuensi isu-isu kerukunan umat beragama. (SP-2)-> (SS2)
		2. Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama melalui pendekatan moderasi beragama. (SP-3)-> (SS2)
		3. Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama. (SP-4)-> (SS2)
		4. Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat. (SP-5)-> (SS2)

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perlindungan Umat Beragama, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti;
 - b. Jumlah aktor kerukunan yang dibina;
 - c. Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina.
2. Menguatnya Peran Lembaga Agama, Organisasi Sosial Keagamaan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat Sebagai Perekat Persatuan dan Kesatuan Bangsa, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi;
 - b. Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan.
3. Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP.
4. Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kerukunan Intra Umat Beragama, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama;
 - b. Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan.
5. Meningkatnya Kualitas Moderasi Beragama Penyuluh Agama, dengan indikator

- kinerja kegiatan, yaitu : persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat.
6. Meningkatnya Pengelolaan Rumah Ibadah Sebagai Pusat Syiar Agama yang Toleran, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase rumah ibadah yang ramah;
 - b. Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina;
 - c. Jumlah Imam Besar Masjid yang ditingkatkan mutunya;
 - d. Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan.
 7. Meningkatnya Kegiatan Penyiaran Agama di Ruang Publik, dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik.
 8. Menguatnya Muatan Moderasi Beragama dalam Mata Pelajaran Agama di Ruang Publik, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;
 - b. Persentase siswa di sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;
 - c. Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;
 - d. Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;
 - e. Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;
 - f. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama;
 - g. Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;
 - h. Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama;
 - i. Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;
 - j. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama;
 - k. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama.
 9. Menguatnya Peran Pendidikan Diniyah dan Pesantren dalam mengembangkan Moderasi Beragama Islam, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase pesantren yang berwawasan moderat;
 - b. Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan Al-Qur'an.

Tujuan kedua penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama; sasaran strategis ketiga yakni meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS3	Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya	Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasnamakan agama (SP-6)-> (SS3)

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut :

1. Menguatnya Dialog Lintas Agama dan Budaya, dengan indikator kinerja kegiatan yaitu Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan;
2. Meningkatnya Pelestarian dan Optimalisasi Produk Budaya Berbasis Agama untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat, dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak, dan sebagainya);
3. Meningkatnya Penghormatan Atas Keragaman Budaya yang merupakan wujud dari Implementasi Pengamalan Nilai Agama, dengan indikator kinerja kegiatan yaitu Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (Pesparawi, Pesparani, MTQ, STQ, Utsawa, dan sebagainya);
4. Meningkatnya Kualitas Literasi Khasanah Budaya Bernafas Agama, dengan indikator kinerja kegiatan yaitu :
 - a. Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi rumah ibadah yang dibina;
 - b. Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina.

2.2.3. Peningkatan Umat Beragama yang Menerima Layanan Keagamaan (Tujuan-3, 8 sasaran kegiatan)

Tujuan ketiga yakni Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan dicapai dengan menetapkan 1 (satu) sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS4	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama	1. Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan (SP-7)-> (SS4)
		2. Terwujudnya penyelenggaraan ibadah haji yang transparan dan akuntabel (SP-8)-> (SS4)

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Sarana Pendukung Pelayanan Keagamaan, dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan;
 - b. Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi;
 - c. Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan;
 - d. Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat;
 - e. Jumlah SDM Ahli Falakiah yang dibina;
 - f. Jumlah Pusat Observasi Bulan yang memenuhi standar.
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Nikah/Rujuk, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Jumlah KUA yang direvitalisasi;
 - b. Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana;
 - c. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah;
 - d. Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah;
 - e. Jumlah penghulu yang dibina.
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Bimbingan Keluarga, dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/hitta sukhaya.
4. Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Ibadah Umrah dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus, dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu :
 - a. Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi;
 - b. Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji yang terbina dan terawasi.
- g. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendaftaran Ibadah Haji, dengan indikator

kinerja kegiatan, sebagai berikut :

- a. Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan;
- b. Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan.
- h. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Jamaah Haji di Asrama Haji, dengan indikator kinerja kegiatan Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu.
- i. Meningkatnya Kualitas Pembinaan Jamaah Haji, dengan indikator kinerja kegiatan yaitu :
 - a. Persentase petugas haji yang professional;
 - b. Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji;
 - c. Persentase kasus jemaah haji yang terselesaikan;
 - d. Jumlah advokasi haji yang terselenggara;
 - e. Persentase pembimbing haji yang bersertifikat.
- j. Meningkatnya Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Haji Terpadu, dengan indikator kinerja kegiatan yaitu : Persentase keberlanjutan layanan (*Continuity service*).

2.2.4 Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas; (Tujuan-4, 2 sasaran kegiatan)

Tujuan keempat peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas, dalam mencapainya menetapkan 6 sasaran strategis.

Sasaran strategis kelima yakni peningkatan pemanfaatan ekonomi keagamaan umat dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS5	Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat	Meningkatnya kualitas penerimaan dana sosial keagamaan, (SP-9)-> (SS5)

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Dana Zakat, dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Persentase amil yang dibina;
 - b. Persentase lembaga zakat yang dibina.
2. Meningkatnya Pengelolaan Aset Wakaf, dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :

- a. Persentase lembaga wakaf yang dibina;
- b. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan;
- c. Persentase tanah wakaf yang bersertifikat.

Untuk mencapai tujuan ke-4 yakni peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas; menetapkan juga sasaran strategis keenam, dan sasaran program sebagai berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS6	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran	Meningkatnya kualitas asesmen dan kemampuan berpikir siswa (SP-10)-> (SS6)

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Penerapan Kurikulum dan Pola Pembelajaran Inovatif, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase madrasah/ sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum
 - b. Jumlah madrasah/ sekolah keagamaan yang melaksanakan program keagamaan
 - c. Jumlah madrasah/ sekolah keagamaan yang melaksanakan program keterampilan/ kejuruan
2. Meningkatnya Kualitas Penilaian Pendidikan, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase guru di madrasah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;
 - b. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;
 - c. Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;
 - d. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/Sekolah Keagamaan;
 - e. Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/sekolah keagamaan;
 - f. Persentase siswa madrasah yang mengikuti asesmen kompetensi;

- g. Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti asesmen kompetensi.
- 3. Meningkatnya Penerapan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Sistem Pembelajaran, dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Persentase madrasah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran;
 - b. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran;
 - c. Persentase mata pelajaran di madrasah yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran;
 - d. Persentase mata pelajaran di sekolah keagamaan yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran.

Tujuan keempat juga menetapkan sasaran strategis ke-7 yakni meningkatnya kualitas pemerataan akses pendidikan dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS7	Meningkatnya kualitas pemerataan akses pendidikan	Meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan (SP-12)-> (SS7)

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Sarana Dan Prasarana Pendidikan, dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Persentase RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana;
 - b. Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana;
 - c. Persentase MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana;
 - d. Persentase MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana;
 - e. Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana;
 - f. Persentase Madrasah/Sekolah Keagamaan di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya;
 - g. Persentase Sekolah Minggu Buddha/Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana.
2. Meningkatnya Pemberian Bantuan Pendidikan bagi Anak Kurang Mampu, Daerah

Afirmasi dan Berbakat, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

- a. Jumlah siswa madrasah penerima BOS;
 - b. Jumlah siswa sekolah keagamaan penerima BOS
 - c. Persentase siswa sekolah keagamaan penerima PIP
 - d. Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional.
3. Meningkatnya Kualitas Penanganan ATS, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- a. Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi;
 - b. Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren.
4. Menguatnya Pelayanan 1 Tahun Prasekolah, dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu: jumlah siswa RA/Pratama Widya Pasraman/Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP.

Tujuan keempat juga menetapkan sasaran strategis kedelapan yakni dengan Peningkatan kualitas pengelolaan dan penempatan pendidik dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS8	Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik	1. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SP-12)-> (SS8)
		2. Meningkatnya kualitas guru yang memenuhi SNP(SP-13)-> (SS8)

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Persentase guru madrasah dan ustadz pendidikan diniyah/muadalah yang lulus sertifikasi;
 - b. Persentase tenaga kependidikan madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi;
 - c. Persentase kepala madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi ;
 - d. Persentase ustad pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG;
2. Terpenuhinya Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan Standar

Minimal, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

- a. Persentase guru sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal;
 - b. Persentase tenaga kependidikan lainnya di sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal;
 - c. Persentase guru pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal;
 - d. Persentase tenaga kependidikan pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal;
3. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Profesi Guru melalui Peningkatan Kualifikasi Pendidik, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- a. Persentase Guru Pendidikan Agama Islam, Ustadz Pendidikan Diniyah/Muadalah, Guru Madrasah, Guru Sekolah Keagamaan yang mengikuti PPG;
 - b. Persentase Guru Pendidikan Agama Islam, Ustadz Pendidikan Diniyah/Muadalah berkualifikasi minimal S1
4. Meningkatnya pemenuhan dan distribusi Tenaga Pendidik berbasis kebutuhan, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- a. Persentase guru/tenaga pendidikan di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus
 - b. Persentase guru pendidikan agama Islam di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus

Tujuan keempat ditetapkan pula sasaran strategis kesembilan yang dengan Peningkatan kualitas penjaminan mutu pendidikan dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS9	Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan	Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan (SP-14)-> (SS9)

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yaitu:

1. Menguatnya Kapasitas dan Akselerasi Akreditasi, dengan indikator kinerja kegiatanyaitu:
 - a. Jumlah madrasah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi

- b. Jumlah sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi berdasarkan hasil pemetaan.
2. Meningkatnya Budaya Mutu Pendidikan, dengan indikator kinerja kegiatan yaitu :
 - a. Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu
 - b. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu
 - c. Persentase siswa madrasah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional
 - d. Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional

Tujuan keempat juga menetapkan sasaran strategis kesepuluh yang dengan Peningkatan kualitas peningkatan kualitas kualitas mental/karakter siswa dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS10	Meningkatnya kualitas mental/karakter siswa	Menguatnya pendidikan karakter siswa (SP-15)-> (SS10)

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yaitu :

1. Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan Madrasah/Sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan, dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Persentase madrasah yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran
 - b. Persentase sekolah keagamaan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran
 - c. Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman
 - d. Persentase madrasah yang ramah anak
 - e. Persentase sekolah keagamaan yang ramah anak
2. Meningkatnya Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda dan Pengembangan Pendidikan Kepramukaan, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan

- b. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada sekolah keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan
- c. Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina
- d. Jumlah gugus pramuka pada sekolah keagamaan yang dibina

2.2.5. Peningkatan Budaya Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Melayani dan Responsif (Tujuan-5, 15 sasaran kegiatan)

Untuk mencapai tujuan Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif dicapai dengan menetapkan sasaran strategis kedua belas dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS12	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	Meningkatnya tata kelola organisasi Unit Eselon 1 yang efektif dan akuntabel (SP-16)-> (SS12)

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Layanan dan Bantuan Hukum, dengan indikator kinerja kegiatan yaitu :
 - a. Persentase produk hukum yang diterbitkan;
 - b. Persentase kasus hukum yang terselesaikan;
 - c. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan.
2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kerjasama Luar Negeri, dengan indikator kinerja kegiatan yaitu : Persentase rekomendasi izin orang asing
3. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan ASN (Pengadaan, Penempatan, Pembinaan dan Pengembangan Pegawai), dengan indikator kinerja kegiatan yaitu :
 - a. Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja;
 - b. Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditandaklanjuti;
 - c. Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan;
 - d. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71);
 - e. Persentase ASN yang memenuhi syarat *leveling* kompetensi jabatannya;
 - f. Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu;
 - g. Persentase data ASN yang diupdate;

- h. Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses.
- 4. Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu;
 - b. Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK);
 - c. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal;
 - d. Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama.
- 5. Meningkatnya Pengelolaan BMN yang akuntabel, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya;
 - b. Persentase tanah yang bersertifikat;
 - c. Persentase nilai Opname Physic (OP) BMN.
- 6. Meningkatnya Kualitas Penataan dan Penguatan Manajemen Organisasi, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis;
 - b. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi;
 - c. Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti.
- 7. Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi;
 - b. Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas;
 - c. Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja.
- 8. Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Anggaran, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase output perencanaan yang berbasis data;
 - b. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra;
 - c. Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti.
- 9. Meningkatnya Kualitas Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan Dan Anggaran, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas;
 - b. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana

pembangunan nasional yang ditindaklanjuti.

10. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Kantor, dengan indikator kinerja kegiatan yaitu Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar
11. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Tata Persuratan, Arsip dan Layanan Pengadaan Barang Jasa, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu;
 - b. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik;
 - c. Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen;
 - d. Persentase menurunnya lelang gagal;
 - e. Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding.
12. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Dan Rumah Tangga, dengan indikator kinerja kegiatan, yakni : Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan
13. Meningkatnya Kualitas Layanan Hubungan Masyarakat Dan Informasi, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi;
 - b. Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang di *counter*.
14. Meningkatnya Kualitas Data dan Sistem Informasi, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut : Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable
15. Meningkatnya Kualitas Administrasi Pendidikan Keagamaan, dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu
 - a. Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional;
 - b. Jumlah dokumen penyusunan rencana program dan anggaran, keuangan, kepegawaian;
 - c. Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yan disediakan;
 - d. Jumlah layanan umum dan perlengkapan;
 - e. Jumlah produk hukum yang dihasilkan.

C. PERJANJIAN KINERJA

No	Sasaran Kegiatan	IKSK	TARGET	
1	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama	1. Nilai kinerja penyuluh agama	100,00	Nilai
		2. Persentase penyuluh agama yang dibina	49,90	%
		3. Jumlah penyiur agama yang dibina kompetensi	62	Orang
		4. Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan	1.767	Kelompok
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama	1. Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti	100,00	%
		2. Jumlah aktor kerukunan yang dibina	272	Orang
		3. Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina	3	Lokasi
3	Menguatnya peran lembaga organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan	1. Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi	6	Lembaga
		2. Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan	2	Kegiatan
4	Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP	97,00	%
5	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama	1. Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama	38,33	%
		2. Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan	1	Lokasi

No	Sasaran Kegiatan	IKSK	TARGET	
6	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat	95,00	%
7	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat	1. Persentase rumah ibadah yang ramah	48,30	%
		2. Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina	11,83	%
		3. Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya	162	Orang
		4. Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan	NA	Lokasi
8	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	4	Kegiatan
9	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama	1. Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	70,00	%
		2. Persentase siswa di sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	87,50	%
		3. Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	42,50	%
		4. Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	14,50	%
		5. Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	56,25	%
		6. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama	50,33	%

No	Sasaran Kegiatan	IKSK	TARGET	
		7. Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	20,10	%
		8. Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama	35,00	%
		9. Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	34,20	%
		10. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama	206	Kegiatan
		11. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama	1	Kegiatan
10	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam	1. Persentase pesantren yang berwawasan moderat	95,00	%
		2. Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan	3,50	%
11	Menguatnya dialog lintas agama dan budaya	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	21	Kegiatan
12	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)	1	Lokasi
13	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (Pesparawi MTQ, STQ, Ustawa, dan sebagainya)	3	Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	IKSK	TARGET	
14	Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama	1. Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi	7	Dokumen
		2. Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina	8	Orang
15	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	1. Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan	674	Unit
		2. Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan	27.274	Eksemplar
		3. Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi	23,00	%
		4. Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan	59	Kegiatan
		5. Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat	29	Lokasi
		6. Jumlah SDM Ahli Falakiah yang dibina	21	Orang
		7. Jumlah Lembaga Hisab Rukyat yang ditingkatkan mutunya	1	Lembaga
16	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk	1. Jumlah KUA yang direvitalisasi/ditingkatkan mutunya	4	Lokasi
		2. Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana	10	Lokasi
		3. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah	4.412	Orang
		4. Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah	4.412	Orang
		5. Jumlah penghulu yang dibina	118	Orang
17	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan Keluarga	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/hitta sukhaya	1.815	Pasangan

No	Sasaran Kegiatan	IKSK	TARGET	
18	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus	1. Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi	78,50	%
19	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	1. Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan	19,52	%
		2. Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan	0,45	%
20	Meningkatnya kualitas pelayanan jamaah haji di asrama haji	1. Persentase asrama haji yang memenuhi standar pelayanan	21,00	%
		2. Persentase pelayanan transportasi jamaah haji yang tepat waktu	85,50	%
21	Meningkatnya kualitas pembinaan jamaah haji	1. Persentase petugas haji yang profesional	87,75	%
		2. Persentase Jamaah Haji yang mengikuti manasik haji	95,50	%
22	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu	Persentase keberlanjutan layanan (Continuity service)	94,00	%
23	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat	1. Persentase amil yang memiliki sertifikat kompetensi	2,74	%
		2. Persentase lembaga zakat yang dibina	56,54	%
24	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf	1. Persentase lembaga wakaf yang dibina	62,46	%
		2. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan	20,00	%

No	Sasaran Kegiatan	IKSK	TARGET	
		3. Persentase tanah wakaf yang bersertifikat	10,00	%
25	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	1. Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	50,00	%
		2. Jumlah madrasah/sekolah keagamaan yang melaksanakan program keagamaan	1	Lembaga
		3. Jumlah madrasah/sekolah keagamaan yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan	1	Lembaga
26	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	1. Persentase guru di madrasah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	48,53	%
		2. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	34,26	%
		3. Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	48,53	%
		4. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/sekolah keagamaan	3	Orang
		5. Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/sekolah keagamaan	NA	Kegiatan
		6. Persentase siswa madrasah yang mengikuti asesmen kompetensi	4,50	%
		7. Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti asesmen kompetensi	76,66	%
27	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem	1. Persentase madrasah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	10,00	%

No	Sasaran Kegiatan	IKSK	TARGET	
	pembelajaran	2. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan TIK untuk e- pembelajaran	15,66	%
		3. Persentase mata pelajaran di madrasah yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e- pembelajaran	10,00	%
		4. Persentase mata pelajaran di sekolah keagamaan yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	28,33	%
28	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	1. Persentase RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM	62,66	%
		2. Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi	62,75	%
		3. Persentase MTs/Wustha/ SMPTK/Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	47,25	%
		4. Persentase MA/Ulya/SMTK/ SMAK/Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	66,40	%
		5. Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana	25,00	%
		6. Persentase Madrasah/Sekolah Keagamaan di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya	36,75	%
		7. Persentase Sekolah Minggu Buddha/Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana	26,00	%

No	Sasaran Kegiatan	IKSK	TARGET	
		prasarana		
29	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, berbakat	1. Jumlah siswa penerima BOS pada	261.605	Jumlah
		2. Jumlah siswa sekolah keagamaan penerima BOS	613	Jumlah
		3. Persentase siswa madrasah penerima PIP	22,00	%
		4. Persentase siswa sekolah keagamaan penerima PIP	61,65	%
		5. Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional.	9,00	%
30	Meningkatnya kualitas penanganan ATS	1. Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi	0,10	%
		2. Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren	38,00	%
31	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah	Jumlah siswa RA/Taman Seminari/ Pratama Widya Pasraman/ Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP	317.182	Orang
32	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1. Persentase guru madrasah dan ustadz pendidikan diniyah/muadalah yang lulus sertifikasi	81,00	%
		2. Persentase tenaga kependidikan madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	21,16	%
		3. Persentase kepala madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	10,65	%

No	Sasaran Kegiatan	IKSK	TARGET	
		4. Persentase ustad pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG	15,00	%
33	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	1. Persentase guru sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	73,33	%
		2. Persentase tenaga kependidikan lainnya di sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	75,00	%
		3. Persentase guru pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan	15,00	%
		4. Persentase tenaga kependidikan pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	NA	%
34	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	1. Persentase Guru Pendidikan Agama Islam, Ustadz Pendidikan Diniyah/ Muadalah, Guru Madrasah, Guru Sekolah Keagamaan yang mengikuti PPG	38,00	%
		2. Persentase Guru Pendidikan Agama Islam, Ustadz Pendidikan Diniyah/ Muadalah berkualifikasi minimal S1	80,00	%
35	Meningkatnya pemenuhan dan distribusi tenaga pendidik berbasis kebutuhan	1. Persentase guru/tenaga pendidikan di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus	100,00	%
		2. Persentase guru pendidikan agama Islam di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus	50,00	%
36	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi	1. Jumlah madrasah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi.	29,00	Lembaga

No	Sasaran Kegiatan	IKSK	TARGET	
		2. Jumlah sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi berdasarkan hasil nemetaan	16,00	Lembaga
37	Meningkatnya budaya mutu pendidikan	1. Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu	90,00	%
		2. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu	71,00	%
		3. Persentase siswa madrasah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	5,00	%
		4. Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	18,60	%
38	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	1. Persentase madrasah yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	75,00	%
		2. Persentase sekolah keagamaan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	61,25	%
		3. Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman	40,00	%
		4. Persentase madrasah yang ramah anak	50,00	%
		5. Persentase sekolah keagamaan yang ramah anak	63,33	%
39	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan	1. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	21	Madrasah
		2. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada sekolah keagamaan yang dibina kepeloporan	2	Sekolah

No	Sasaran Kegiatan	IKSK	TARGET	
		dan kesukarelawanan		
		3. Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina	24	Unit
		4. Jumlah gugus pramuka pada sekolah keagamaan yang dibina	5	Unit
40	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	1. Persentase produk hukum yang diterbitkan	85,00	%
		2. Persentase kasus hukum yang terselesaikan	88,00	%
		3. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	1	Kegiatan
41	Meningkatnya kualitas pengelolaan kerjasama luar negeri	Persentase rekomendasi izin orang asing	78,00	%
42	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	1. Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja	100,00	%
		2. Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti	95,00	%
		3. Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan	55,00	%
		4. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)	52,00	%
		5. Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya	45,00	%
		6. Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu	95,00	%
		7. Persentase data ASN yang diupdate	90,00	%

No	Sasaran Kegiatan	IKSK	TARGET	
		8. Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses	74,00	%
43	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan	1. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	2	Dokumen
		2. Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)	86,00	%
		3. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal	96,00	%
		4. Persentase penyelesaian Kerugian	55,00	%
44	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel	1. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	41,95	%
		2. Persentase tanah yang bersertifikat	31,35	%
		3. Persentase nilai Opname Physic	97,00	%
45	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi	1. Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis	75,00	%
		2. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi	40,00	%
		3. Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	95,00	%
46	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	1. Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi	85,00	%
		2. Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas	16,00	Satker
		3. Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja	15,00	Orang

No	Sasaran Kegiatan	IKSK	TARGET	
47	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	1. Persentase output perencanaan yang berbasis data	93,00	%
		2. Persentase keselarasan muatan	90,00	%
		3. Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti	70,00	%
48	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran	1. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas	94,00	%
		2. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti	70,00	%
49	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	75,00	%
50	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	1. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	99,03	%
		2. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik	85,79	%
		3. Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen	83,26	%
		4. Persentase menurunnya lelang gagal	74,95	%
		5. Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding	71,65	%
51	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga	1. Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan	75,00	%
52	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi	1. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi	87	Kegiatan
		2. Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter	91,00	%

No	Sasaran Kegiatan	IKSK	TARGET	
53	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	1. Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable	70,00	%
54	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan	1. Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	184	Orang
		2. Jumlah dokumen penyusunan rencana program dan anggaran, keuangan, kepegawaian	1	Dokumen
		3. Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang disediakan	15	Unit
		4. Jumlah layanan umum dan perlengkapan	32	Unit

KODE	SASARAN	ANGGARAN
025.03.DC . Program Layanan Umat dan Kerukunan Beragama		
2104	Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	
BDC.001	Penghulu yang ditingkatkan kompetensinya	245.000.000
QAA.001	KUA yang profesional melayani	2.054.000.000
QAA.002	Layanan Nikah dan rujuk	1.522.900.000
QDE.001	Keluarga islam yang memperoleh Bimbingan Perkawinan dan Keluarga Sakinah	544.000.000
2122	Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat Wakaf	
ADE.001	Lembaga Zakat yang Terakreditasi	91.000.000
BBC.001	Layanan Advokasi Aset Wakaf	243.600.000
PEE.001	Aset Wakaf Produktif	30.000.000

QDB.001	Lembaga Zakat dan Wakaf yang di Bina	215.850.000
QEI.001	Bantuan Operasional BWI	100.000.000
QEI.004	Bantuan Operasional Baznas	88.000.000
2123	Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	
PEG.001	Event keagamaan dan Seni Budaya Bernafaskan Agama	150.000.000
QDC.002	Penyuluh yang ditingkatkan Kompetensinya	400.000.000
QDD.001	Dialog Kerukunan Intra Umat Beragama Islam dan Moderasi Beragama	255.000.000
QEI.001	Bantuan ormas dan lembaga Keagamaan	530.000.000
2124	Pengelolaan urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	
BMB.001	Layanan Syariah dan Hisab Rukyat	180.000.000
QDD.001	Konflik Intra Umat Beragama Islam yang Ditindaklanjuti	138.500.000
QEI.001	Rumah Ibadah yang di Fasilitas untuk Meningkatkan Layanan	185.000.000
2125	Dukungan Manaiemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	
EAA.001	Layanan Perkantoran	5.115.002.000
025.05.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan	1.665.000.000
2137	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen	1.665.000.000
025.05.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	959.900.000
2136	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen	959.900.000
025.05.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	763.000.000
4434	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan	

	Agama	763.000.000
025.05.WA	Program Dukungan Manajemen	8.734.761.000
2138	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	656.293.000
5100	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan	8.078.468.000
025.06.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	1.741.959.000
2140	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik	1.741.959.000
025.06.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	750.000.000
2139	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik	750.000.000
025.06.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	2.761.320.000
4435	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama	2.761.320.000
025.06.WA	Program Dukungan Manajemen	8.792.176.000
2141	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	793.872.000
5102	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik	7.998.304.000
025.08.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan	2.419.100.000
2145	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Budha	2.419.100.000
025.08.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	2.124.000.000
4012	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Budha	2.124.000.000

025.08.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	1.220.954.000
4437	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama	1.220.954.000
025.08.WA	Program Dukungan Manajemen	4.007.240.000
5105	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan	4.007.240.000
025.07.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	1.318.221.000
2143	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu	1.318.221.000
025.07.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	467.000.000
2142	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu	467.000.000
025.07.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	820.000.000
4436	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Hindu	820.000.000
025.07.WA	Program Dukungan Manajemen	7.595.828.000
2144	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	294.680.000
5103	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan	7.301.148.000
	Lembaga PPIU yang Terbina	180,176,000
	Lembaga PIHK yang terbina	100,465,000
	Pendaftaran, Dokumen dan Perlengkapan Jamaah	1,154,555,000
	Pendampingan Hukum Masalah Haji	58,920,000
	Petugas Haji yang profesional	17,174,727,000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Timur dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) pada masing-masing sasaran kegiatan. Adapun capaian kinerja tersebut disajikan dalam tabel di bawah ini:

TABEL
CAPAIAN KINERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021

NO	SASARAN KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KINERJA	TARGET jumlah	REALISASI		KET
					JML	%	
1	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama	Penais Zawa, semua Bimas, Bagian Tata Usaha (Subbag Ortala KUB)	1 Nilai kinerja penyuluh agama	100	95	95%	Pandemi Covid Pemotongan Anggaran Pemotongan Anggaran Pemotongan Anggaran
			2 Persentase penyuluh agama yang dibina	49,9	45,68	92%	
			3 Jumlah penyar agama yang dibina kompetensi	62	55	89%	
			4 Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan	1767	1600	91%	
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama	Bagian Tata Usaha (Subbag Ortala dan KUB)	1 Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti	100	100	100%	tercapai
			2 Jumlah aktor kerukunan yang dibina	272	250	92%	Pandemi Covid tercapai
			3 Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina	3	4	100%	
3	Menguatnya peran lembaga organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa	Bagian Tata Usaha (Subbag Ortala dan KUB)	1 Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi	6	6	100%	tercapai
			2 Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan	2	2	100%	tercapai
4	Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Bagian Tata Usaha (Subbag Ortala dan KUB)	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP	97	97	100%	tercapai

5	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama	Bagian Tata Usaha (Subbag Ortala dan KUB), Penais Zawa, Semua Bimas	1	Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama	38,33	34,98	91%	Pemotongan Anggaran, Pandemi Covid
			2	Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan	1	1	100%	tercapai
6	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama	Penais Zawa, Semua Bimas	1	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat	95	93,87	99%	tercapai
7	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	Urais, Semua Bimas	1	Persentase rumah ibadah yang ramah	48,3	45,78	95%	pandemi covid
			2	Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina	11,83	11	93%	Pandemi Covid
			3	Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya	162	145	90%	pandemi covid
			4	Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan	NA	NA	NA	NA
8	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik	Penais Zawa, Semua Bimas	1	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	4	4	100%	tercapai
9	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama	Bidang Madrasah, Pais, Semua bimas	1	Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	70	65,34	93%	Pandemi Covid, Sekolah Daring
			2	Persentase siswa di sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	87,5	75,67	86%	Pandemi Covid, Sekolah Daring
			3	Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	42,5	40	94%	Pandemi Covid, Sekolah Daring
			4	Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	14,50	14	97%	Pandemi Covid, PPKM
			5	Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	56,25	51,2	91%	Pandemi Covid, PPKM
			6	Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama	50,33	48,3	96%	Pandemi Covid, PPKM
			7	Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	20,10	18,76	93%	Pandemi Covid, PPKM

			8	Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama	35,00	30,02	86%	Pandemi Covid, PPKM
			9	Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	34,20	31,29	91%	Pandemi Covid, PPKM
			10	Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama	206	180	87%	Pandemi Covid, PPKM
			11	Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama	1	1	100%	Pandemi Covid, PPKM
10	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam	Bidang Pontren	1	Persentase pesantren yang berwawasan moderat	95,00	94,87	100%	tercapai
			2	Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan Al Qur'an	3,50	3,34	95%	Pandemi Covid, PPKM
11	Menguatnya dialog lintas agama dan budaya	Bagian Tata Usaha (Subbag Ortala dan KUB)	1	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	21	21	100%	tercapai
12	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat	Bidang Urais, Penais Zawa, Semua Bimas		Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)	1	1	100%	tercapai
13	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama	Bidang Urais, Penais Zawa, Semua Bimas		Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (Pesparawi MTQ, STQ, Ustawa, dan sebagainya)	3	3	100%	tercapai
14	Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama	Bidang Urais, Penais Zawa, Semua Bimas	1	Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi	7	7	100%	tercapai
			2	Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina	8	8	100%	tercapai
15	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	Bidang Urais, Penais Zawa, Semua Bimas	1	Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan	674	625	93%	Pemotongan anggaran
			2	Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan	27.274	25000	92%	Pemotongan anggaran

			3	Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi	23	20	87%	Pemotongan anggaran
			4	Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan	59	55	93%	Pemotongan anggaran
			5	Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat	29	26	90%	Pemotongan anggaran
			6	Jumlah SDM Ahli Falakiah yang dibina	21	19	90%	Pemotongan anggaran
			7	Jumlah Lembaga Hisab Rukyat yang ditingkatkan mutunya	1	1	100%	tercapai
16	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk	Bidang Urais, Penais Zawa	1	Jumlah KUA yang direvitalisasi/ditingkatkan mutunya	4	4	100%	tercapai
			2	Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana	10	10	100%	tercapai
			3	Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah	4.412	4400	100%	tercapai
			4	Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah	4.412	4000	91%	Pandemi covid, PPKM
			5	Jumlah penghulu yang dibina	118	133	100%	tercapai
17	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	Bidang Urais, Penais Zawa, Semua Bimas	1	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/hitta sukhaya	1.815	1656	91%	pandemi covid, PPKM
18	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus	Bidang PHU	1	Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi	78,5	72	92%	Pandemi Covid, PPKM
19	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	Bidang PHU	1	Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan	19,52	18	92%	Pandemi Covid, Haji Batal
			2	Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan	0,45	0	100%	Haji Batal
20	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji di asrama haji	Bidang PHU	1	Persentase asrama haji yang memenuhi standar pelayanan	21	19	90%	Haji Batal
			2	Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu	85,5	0	0%	Haji Batal
21	Meningkatnya kualitas pembinaan	Bidang PHU	1	Persentase petugas haji yang profesional	87,75	80	91%	Haji Batal

	jamaah haji		2	Persentase Jamaah Haji yang mengikuti manasik haji	95,5	0	0%	Haji Batal
22	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu	Bidang PHU	1	Persentase keberlanjutan layanan (<i>Continuity service</i>)	94	87	93%	Haji Batal
23	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat	Bidang Penais Zawa	1	Persentase amil yang memiliki sertifikat kompetensi	2,74	2,5	91%	Pandemi Covid, PPKM
			2	Persentase lembaga zakat yang dibina	56,54	53,79	95%	Pandemi Covid, PPKM
24	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf	Bidang Penais Zawa	1	Persentase lembaga wakaf yang dibina	62,46	59,56	95%	pandemi covid, PPKM
			2	Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan	20	19	95%	pandemi covid, PPKM
			3	Persentase tanah wakaf yang bersertifikat	10	10	100%	tercapai
25	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	Bidang Madrasah, PAIS, Semua Bimas	1	Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	50	45,82	92%	Pandemi Covid, Sekolah Daring
			2	Jumlah madrasah/sekolah keagamaan yang melaksanakan program keagamaan	1	1	100%	tercapai
			3	Jumlah madrasah/sekolah keagamaan yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan	1	1	100%	tercapai
26	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	Bidang Madrasah, PAIS, Semua Bimas	1	Persentase guru di madrasah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	48,53	44,18	91%	Pandemi Covid, PPKM
			2	Persentase guru di sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	34,26	33,01	96%	Pandemi Covid, PPKM
			3	Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	48,53	44,09	91%	Pandemi Covid, PPKM
			4	Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/sekolah keagamaan	3	3	100%	tercapai
			5	Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/sekolah keagamaan	NA	NA	NA	NA

			6	Persentase siswa madrasah yang mengikuti asesmen kompetensi	4,5	4,01	89%	Pandemi Covid, PPKM
			7	Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti asesmen kompetensi	76,66	71,82	94%	Pandemi Covid, PPKM
27	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran	Bidang Madrasah, PAIS, Semua Bimas	1	Persentase madrasah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	10	9,02	90%	Pandemi Covid, PPKM
			2	Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	15,66	14,28	91%	Pandemi Covid, PPKM
			3	Persentase mata pelajaran di madrasah yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	10	9,2	92%	Pandemi Covid, PPKM
			4	Persentase mata pelajaran di sekolah keagamaan yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	28,33	25,89	91%	pandemi covid, PPKM
28	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	Bidang Madrasah, Pontren, PAIS, Semua Bimas	1	Persentase RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana	62,66	58,34	93%	pemotongan anggaran
			2	Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	62,75	57,98	92%	pemotongan anggaran
			3	Persentase MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	47,25	43,92	93%	pemotongan anggaran
			4	Persentase MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	66,4	60,07	90%	pemotongan anggaran
			5	Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana	25	22,89	92%	pemotongan anggaran
			6	Persentase Madrasah/Sekolah Keagamaan di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya	36,75	33,74	92%	pemotongan anggaran
			7	Persentase Sekolah Minggu Buddha/Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana	26	24,17	93%	pemotongan anggaran
29	Meningkatnya pemberian bantuan	Bidang Madrasah,	1	Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah	261.605	250000	96%	tercapai

	pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	Pontren, PAIS, Semua Bimas	2	Jumlah siswa sekolah keagamaan penerima BOS	613	600	98%	tercapai
			3	Persentase siswa madrasah penerima PIP	22	20,12	91%	tercapai
			4	Persentase siswa sekolah keagamaan penerima PIP	61,65	58,23	94%	tercapai
			5	Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional.	9	8,12	90%	pemotongan anggaran
30	Meningkatnya kualitas penanganan ATS	Bidang Madrasah, Pontren	1	Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi	0,1	0,1	100%	tercapai
			2	Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren	38	34,54	91%	Pandemi covid, PPKM
31	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah	Bidang Madrasah, Semua Bimas	1	Jumlah siswa RA/Taman Seminari/ Pratama Widya Pasraman/ Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP	317.182	3000 00	95%	pemotongan anggaran
32	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Bidang Madrasah, pontren, semua bimas	1	Persentase guru madrasah dan ustadz pendidikan diniyah/muadalah yang lulus sertifikasi	81	73,65	91%	Pandemi covid, PPKM
			2	Persentase tenaga kependidikan madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	21,16	19,23	91%	pandemi covid, PPKM
			3	Persentase kepala madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	10,65	9,66	91%	pandemi covid, PPKM
			4	Persentase ustad pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG	15	13,87	92%	pandemi covid, PPKM
33	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	Bidang Madrasah, Pais, Semua Bimas	1	Persentase guru sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	73,33	68,56	93%	tercapai
			2	Persentase tenaga kependidikan lainnya di sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	75	67,78	90%	tercapai

			3	Persentase guru pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	15	13,72	91%	tercapai
			4	Persentase tenaga kependidikan pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	NA	NA	NA	NA
34	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	Bidang Madrasah, Pais, Semua Bimas	1	Persentase Guru Pendidikan Agama Islam, Ustadz Pendidikan Diniyah/Muadalah, Guru Madrasah, Guru Sekolah Keagamaan yang mengikuti PPG;	38	34,91	92%	tercapai
			2	Persentase Guru Pendidikan Agama Islam, Ustadz Pendidikan Diniyah/Muadalah berkualifikasi minimal S1	80	73,02	91%	tercapai
35	Meningkatnya pemenuhan dan distribusi tenaga pendidik berbasis kebutuhan	Bidang Madrasah, Pais	1	Persentase guru/tenaga pendidikan di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus	100	100	100%	tercapai
			2	Persentase guru pendidikan agama Islam di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus	50	45,98	92%	tercapai
36	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi	Bidang Madrasah, Pais, Semua Bimas	1	Jumlah madrasah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi.	29	27	93%	Pandemi Covid, PPKM
			2	Jumlah sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi berdasarkan hasil pemetaan	16	15	94%	Pandemi Covid, PPKM
37	Meningkatnya budaya mutu pendidikan	Bidang Madrasah, Pais, Semua Bimas	1	Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu	70	63,24	90%	Pandemi Covid, PPKM
			2	Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu	52	65,82	100%	tercapai
			3	Persentase siswa madrasah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	4,5	4,12	92%	Pandemi Covid, PPKM
			4	Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	9,4	9,01	96%	Pandemi Covid, PPKM

38	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	Bidang Madrasah, Pontren, semua bimas	1	Persentase madrasah yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	75	70,21	94%	sekolah daring
			2	Persentase sekolah keagamaan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	61,25	56,97	93%	sekolah daring
			3	Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman	40	37,22	93%	sekolah daring
			4	Persentase madrasah yang ramah anak	50	46,39	93%	sekolah daring
			5	Persentase sekolah keagamaan yang ramah anak	63,33	57,51	91%	sekolah daring
39	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan	Bidang Madrasah, Pais, Semua Bimas	1	Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	21	19	90%	sekolah daring
			2	Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada sekolah keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	2	2	100%	sekolah daring
			3	Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina	24	22	92%	Pandemi Covid, PPKM
			4	Jumlah gugus pramuka pada sekolah keagamaan yang dibina	5	5	100%	Pandemi Covid, PPKM
40	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	Bagian Tata Usaha (Subbag Kepegawaian dan hukum)	1	Persentase produk hukum yang diterbitkan	85	80	94%	Pandemi Covid, PPKM
			2	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	88	81	92%	Pandemi Covid, PPKM
			3	Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	1	1	100%	tercapai
41	Meningkatnya kualitas pengelolaan kerjasama luar negeri	Bagian Tata Usaha (Subbag Ortala dan Kub)	1	Persentase rekomendasi izin orang asing	78	70	90%	Pandemi Covid, PPKM
42	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	Bagian Tata Usaha (Subbag Kepegawaian dan hukum)	1	Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja	100	100	100%	tercapai
			2	Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti	95	90	95%	Pandemi Covid, PPKM

			3	Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan	55	55	100%	tercapai
			4	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)	52	52	100%	tercapai
			5	Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya	45	42,34	94%	Pandemi Covid, PPKM
			6	Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu	95	90	95%	Pandemi Covid, PPKM
			7	Persentase data ASN yang diupdate	90	85	94%	Pandemi Covid, PPKM
			8	Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses	74	70	95%	Pandemi Covid, PPKM
43	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan	Bagian Tata Usaha (Subbag Keuangan dan BMN)	1	Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	2	2	100%	tercapai
			2	Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)	95	90	95%	Pandemi Covid, PPKM
			3	Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal	95,69	92	96%	Pandemi Covid, PPKM
			4	Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama	50	48	96%	Pandemi Covid, PPKM
44	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel	Bagian Tata Usaha (Subbag Keuangan dan BMN)	1	Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	41,95	40	95%	Pandemi Covid, PPKM
			2	Persentase tanah yang bersertifikat	31,35	28,71	92%	Pandemi Covid, PPKM
			3	Persentase nilai Opname Physic (OP) BMN	97	95	98%	tercapai
45	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi	Bagian Tata Usaha (Subbag Orta dan Kub)	1	Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis	75	73	97%	
			2	Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi	40	38	95%	Pandemi Covid, PPKM

			3	Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	95	90	95%	tercapai
46	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	Bagian Tata Usaha (Subbag Ortala dan Kub)	1	Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi	85	80	94%	Pandemi Covid, PPKM
			2	Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas	16	16	100%	tercapai
			3	Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja	15	11	73%	Pandemi Covid, PPKM
47	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	Bagian Tata Usaha (Subbag Perencanaan, Data dan Informasi)	1	Persentase output perencanaan yang berbasis data	93	90	97%	Pandemi Covid, PPKM
			2	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	90	90	100%	tercapai
			3	Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti	70	68	97%	Pandemi Covid, PPKM
48	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran	Bagian Tata Usaha (Subbag Perencanaan, Data dan Informasi)	1	Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas	94	90	96%	Pandemi Covid, PPKM
			2	Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti	70	70	100%	tercapai
49	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor	Bagian Tata Usaha (Subbag Umum dan Humas)	1	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	75	74	99%	tercapai
50	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	Bagian Tata Usaha (Subbag Umum dan Humas)	1	Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	99,03	99	100%	tercapai
			2	Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik	85,79	82,34	96%	Pandemi Covid, PPKM
			3	Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen	83,26	85	100%	tercapai
			4	Persentase menurunnya lelang gagal	74,95	75	100%	tercapai
			5	Persentase menurunnya sengketa dan sengketa banding	71,65	68,87	96%	pandemi covid, PPKM
51	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga	Bagian Tata Usaha (Subbag Umum dan Humas)	1	Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan	75	75	100%	tercapai

52	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi	Bagian Tata Usaha (Subbag Umum dan Humas)	1	Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi	87	87	100%	tercapai
			2	Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter	91	90	99%	tercapai
53	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	Bagian Tata Usaha (Subbag Perencanaan, Data dan Informasi)	1	Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable	70	65	93%	Pandemi Covid, PPKM
54	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan	Bagian Tata Usaha (Subbag Keuangan dan BMN)	1	Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	184	184	100%	tercapai
		Bagian Tata Usaha (Subbag Perencanaan, Data dan Informasi)	2	Jumlah dokumen penyusunan rencana program dan anggaran, keuangan, kepegawaian	1	1	100%	tercapai
		Bagian Tata Usaha (Subbag Umum dan Humas)	3	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yan disediakan	15	15	100%	tercapai
		Bagian Tata Usaha (Subbag Umum dan Humas)	4	Jumlah layanan umum dan perlengkapan	32	30	94%	pemotongan anggaran
RERATA CAPAIAN (%)							94%	

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat keterkaitan antara pencapaian kinerja kegiatan dengan program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Berikut kami sampaikan analisis capaian kinerja pada Tahun 2021 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

SK 1: Meningkatkan Kualitas Bimbingan Dan Penyuluhan Agama

Penyuluh agama di setiap agama berperan untuk menyampaikan dakwah yang berisikan tentang merawat kerukunan antaragama, antarsuku dalam perbedaan. Penyuluh agama di setiap agama memiliki peran yang sangat strategis di masyarakat atau terhadap umat beragama. Untuk meningkatkan

kualitas bimbingan dan penyuluhan agama, maka diperlukan peningkatan kompetensi penyuluh yang meliputi:

- a. Kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan adalah berupa kemampuan dalam membuat perencanaan meliputi rencana operasional, rencana tahunan dan rencana lima tahun, serta kemampuan dalam mengorganisir tugas, kemampuan melakukan pengkoordinasian dan kemampuan menggerakkan semua potensi yang ada, serta kompetensi dalam melakukan pengawasan.
- b. Kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja, kemampuan dalam memberikan bimbingan agama dan penyuluhan pembangunan, kemampuan melakukan bimbingan dan penyuluhan terhadap ketompok binaan, pembinaan kepada lembaga keagamaan.
- c. Kompetensi sosial kultural mengacu pada kamus kompetensi jabatan Kementerian Agama terdapat pada Kompetensi inti harmonisasi keberagaman, yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan sehingga diharapkan mampu memberikan pencitraan yang baik dan positif pada penata layanan Penyuluh Agama.



Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Penyuluh di 38 Kab/Kota

SK 2: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perlindungan Umat Beragama

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan perlindungan umat beragama, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur memberikan bantuan terhadap Forum Kerukunan Umat Beragama melalui DIPA Kanwil Kemenag Jatim memberikan bantuan terhadap FKUB Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 50.000.000,-. Adapun untuk FKUB Kabupaten/Kota diberikan melalui DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan jumlah sebesar Rp. 40.000.000,- yang diberikan kepada 38 FKUB Kabupaten/Kota se Jawa Timur.

Selain itu, untuk semakin mengembangkan kerukunan umaat beragama Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur menetapkan 4 (empat) Desa Kerukunan yang dipilih setelah melalui proses seleksi administrasi dan visitasi lapangan. Keempat desa tersebut adalah:

- 1) Desa Ngadiwono, Kec. Tosari, Kab. Pasuruan;
- 2) Desa Pejagan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan;
- 3) Desa Sekaran, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri;
- 4) Desa Pacet, Kec. Pacet, Kab Mojokerto;

Masing-masing desa kerukunan tersebut mendapatkan bantuan dana dari Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Timur sebesar Rp. 30.000.000,- yang digunakan untuk kegiatan pengembangan kerukunan. Selain dana bantuan tersebut, pada acara penandatanganan prasasti yang ditandatangani oleh Gubernur Jawa Timur beserta Ka. Kanwil Kemenag Jatim, Gubernur juga memberikan bantuan paket sembako untuk keempat desa sadar kerukunan.



Seremoni Pemberian Bantuan Desa Sadar Kerukunan



Penandatanganan Prasasti Desa Sadar Kerukunan

SK 3: Menguatnya Peran Lembaga Organisasi Sosial Keagamaan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat Sebagai Perekat Persatuan Dan Kesatuan Bangsa

Dialog digambarkan sebagai keterbukaan pandangan antara orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap satu sama lain. Dialog antar umat beragama merupakan salah satu wujud keserasian dan keharmonisan, karena adanya pandangan dan pendekatan positif antara satu pihak dengan pihak yang lain. Dialog akan menghasilkan pengukuhan keserasian dan saling pengertian. Kecenderungan dialog tidak berhenti hanya sebagai suatu gaya hidup, tetapi juga menjadi suatu pandangan hidup.

Orientasi dialog bukan untuk saling mengalahkan tetapi untuk memahami antara satu pihak dengan lain dengan baik, mencapai kesepakatan penuh secara universal. Dialog juga berorientasi sebagai sarana komunikasi untuk menjembatani jurang ketidaktahuan dan kesalahpahaman dalam budaya yang berbeda, mengungkapkan pandangan dalam bahasa masing-masing. Dialog bukan hanya berorientasi untuk hidup bersama secara damai dengan cara toleransi dengan pemeluk agama lain, melainkan juga berpartisipasi secara aktif terhadap keberadaan pemeluk agama lain. Lebih penting lagi orientasi dialog adalah koeksistensi ke pro-eksistensi. Koeksistensi mengutamakan terciptanya toleransi. Pro-eksistensi mencari persamaan doktriner, tradisi, semangat dan sejarah, juga berupaya mencari unsur-unsur yang meliputi perbedaan dan hal-hal yang menyimpan konflik.

Dialog sangat penting untuk mengurangi kesombongan, agresivitas, dan hal-hal negatif lain dalam cara-cara pemeluk agama melaksanakan tugas penyebaran agama masing-masing melalui misi dakwah. Negara Indonesia yang pluralitas agama, dialog menjadi pilihan alternatif yang ideal dalam penyelesaian konflik antar umat beragama. Konflik antar umat beragama bisa berdampak sangat negatif dalam kehidupan sosial masyarakat. Dialog dapat dijadikan sebagai solusi untuk menyelesaikan fenomena tersebut, dan dialog bisa dijadikan sebagai upaya pencegahan sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan



Kegiatan Pengarusutamaan Moderasi Beragama dan Wawasan Kebangsaan bagi Penyuluh Agama Islam di Kab. Trenggalek



Kegiatan Peningkatan Manajemen Penanganan Isu Kerukunan Umat Beragama Bagi Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Hotel Mercure Grand Mirama, Surabaya

SK 4: Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Bantuan Operasional FKUB adalah dana APBN yang dituangkan dalam DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov Jatim maupun DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang digunakan untuk operasional FKUB pada tahun anggaran 2021. Untuk FKUB Propinsi bantuan operasional senilai Rp 50.000.000 dan untuk FKUB kabupaten/kota senilai Rp 40.000.000. Semua

bantuan operasional dapat tersalurkan sesuai petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban bantuan operasional FKUB.



Kegiatan Rapat Kerja FKUB Provinsi Jawa Timur TA 2021 di Pasuruan

SK 5: Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kerukunan Intra Umat Beragama

Kerukunan intra umat beragama yaitu suatu bentuk kerukunan yang terjalin antar masyarakat penganut satu agama. Untuk mewujudkan kerukunan intra umat beragama beberapa langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
- 2) Mengadakan forum-forum komunikasi.
- 3) Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat upacara keagamaan.
- 4) Pembinaan kerukunan intern dengan melibatkan tokoh serta organisasi keagamaan secara langsung.

SK 6: Meningkatnya Kualitas Moderasi Beragama Penyuluh Agama.

Moderasi beragama adalah proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, agar terhindar dari perilaku yang menyimpang yang tidak ada diajarkan di dalam agama. Penyuluh agama di Jawa Timur sudah 100% yang berwawasan moderat dan dengan kriteria antara lain sebagai berikut:

- 1) Keikutsertaan Penyuluh dalam Kegiatan Moderasi Beragama
- 2) Penyampaian Konten Moderasi melalui Medsos
- 3) Memiliki nilai kemanusiaan
- 4) Menjunjung Bhinneka Tunggal Ika
- 5) Berjiwa NKRI
- 6) Memiliki pengetahuan tentang wawasan kebangsaan



Sosialisasi Moderasi Beragama Untuk Penyuluh di Kabupaten Probolinggo

SK 7: Meningkatnya Pengelolaan Rumah Ibadah Sebagai Pusat Syiar Agama Yang Toleran

Rumah ibadah secara peruntukannya tidak hanya berfungsi ibadah. Akan tetapi rumah ibadah juga berfungsi juga sebagai sarana sosial seperti pendidikan, kegiatan sosial lainnya dan juga berfungsi politis. Sehingga dalam perkembangannya rumah ibadah harus dibut seramah dan setoleran mungkin. Rumah ibadah yang ramah dan toleran memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1) Rumah ibadah yang memiliki fasilitas bagi umat difabel
- 2) Rumah ibadah tidak digunakan oleh kelompok intoleran
- 3) Rumah Ibadah melakukan aksi sosial di lingkungannya
- 4) Terbuka untuk berkolaborasi seni budaya antar umat beragama



Masjid Cheng Ho Surabaya sebagai Pusat Syiar Agama Yang Toleran

SK 8: Meningkatnya Kegiatan Penyiaran Agama Di Ruang Publik

Penyiaran agama di ruang publik dilakukan oleh berbagai agama baik melalui media televisi, radio, surat kabar, maupun jaringan media sosial lainnya seperti kanal youtube:



Ceramah Agama Hindu oleh Pembimas Hindu Kanwil Jatim Melalui Kanal Youtube

SK 9: Menguatnya Muatan Moderasi Beragama Dalam Mata Pelajaran Agama

Seluruh mata pelajaran telah bermuatan moderasi beragama. Di samping itu, guru telah mendapatkan pembinaan terkait moderasi beragama baik oleh kepala madrasah, pengawas, pimpinan satker/unit kerja/pihak lain.



Pembinaan Moderasi Beragama dan Wawasan Kebangsaan di MAN 1 Probolinggo

SK 10: Menguatnya Peran Pendidikan Diniyah dan Pesantren dalam Mengembangkan Moderasi Beragama Islam

Pesantren merupakan basis dan cikal bakal dari pengajaran dan pendidikan Islam yang berwawasan moderat, yang mengajarkan nilai-nilai sejak turun temurun dari era para wali songo mendakwahkan Islam di tanah Nusantara. Pendidikan Islam moderat memiliki 10 nilai dasar yang menjadi indikatornya yakni:

- 1) Pendidikan damai, yang selalu menghormati hak asasi manusia dan persaudaran antar ras, bangsa dan kelompok agama.
- 2) Pendidikan yang mengembangkan bakat kewirausahaan dan kemitraan.
- 3) Pendidikan yang memperhatikan visi profetik Islam yaitu, humanisasi, liberasi untuk berubahan sosial.
- 4) Pendidikan yang memuat ajaran toleransi dalam beragama.
- 5) Pendidikan yang mengajarkan paham Islam yang menjadi mainstream Islam Indonesia yang moderat

- 6) Pendidikan yang menyeimbangkan antara wawasan intelektual, wawasan spiritual dan akhlak mulia dan keterampilan
- 7) Pendidikan yang menghasilkan ulama yang intelek dan intelek yang ulama.
- 8) Pendidikan yang menjadi solusi bagi setiap masalah-masalah pendidikan saat ini .
- 9) Pendidikan yang menekankan mutu pendidikan secara komprehensif.
- 10) Pendidikan yang mampu meningkatkan penguasaan atas bahasa asing.



Kunjungan Kerja dan Silaturahmi Komisi VIII DPR RI dengan Pengasuh Pondok Pesantren se Jawa Timur di Ponpes Riyadhul Jannah, Pacet, Mojokerto

SK 11: Menguatnya Dialog Lintas Agama dan Budaya

Salah satu upaya untuk meningkatkan kerukunan antar umat beragama adalah dengan memperbanyak forum dan ruang dialog lintas agama dan lintas budaya. Membangun semangat keragaman dan kebhinnekaan sangat diperlukan bagi negara Indonesia yang plural dan majemuk. Dialog agama dan lintas budaya diperlukan untuk membangun semangat saling menghargai agama, kepercayaan, dan budaya orang lain.



Kegiatan Dialog Lintas Agama di Kab. Sumenep



Kegiatan Dialog Lintas Agama di Kota Surabaya

SK 12: Meningkatnya Pelestarian dan Optimalisasi Produk Budaya Berbasis Agama untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat

Budaya dan Agama merupakan elemen yang tidak terpisahkan, terutama dalam konteks Indonesia. Hampir semua agama di Indonesia tidak bisa melepaskan diri dari sentuhan budaya lokal, kemudian antara budaya dan

agama tersebut terjalin suatu hubungan yang baik. Seringkali terdapat produk-produk budaya berbasis agama yang memiliki dampak yang baik untuk kesejahteraan umat yang perlu untuk dilestarikan.



Hari Raya Kasada Yang Dirayakan Oleh Umat Hindu Suku Tengger yang Telah Menjadi Destinasi Wisata Budaya Internasional

SK 13: Meningkatnya Penghormatan Atas Keragaman Budaya Yang Merupakan Wujud Dari Implementasi Pengamalan Nilai Agama

Sasaran kegiatan ini diwujudkan dengan dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama seperti MTQ, Pesparawi, Ustawa, dan lain lain. Di Jawa Timur MTQ tahun 2021 diselenggarakan di Kabupaten Sampang pada bulan November 2021 dan dibuka oleh Gubernur Jawa Timur.



Gubernur Jawa Timur Membuka MTQ XXIX Pada Bulan November 2021 di Sampang, Jawa Timur

SK 14: Meningkatnya Kualitas Literasi Khasanah Budaya Bernafas Agama

Salah satu langkah yang ditempuh untuk meningkatkan kualitas sarana pendukung keagamaan adalah dengan menginventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi direktori pustaka agama yang dilakukan per lokus serta melaksanakan pembinaan manajemen perpustakaan rumah ibadah.

SK 15: Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan

Sasaran kegiatan ini mengandung muatan untuk perbaikan kualitas berbagai macam sarana pendukung dalam pelayanan keagamaan seperti. Dalam sasaran ini terdapat beberapa indikator antara lain sarana dan prasarana layanan peribadatan; kitab suci dan buku keagamaan; lembaga keagamaan yang difasilitasi; bimbingan layanan syariah; pengukuran arah kiblat; pembinaan Ahli Falakiah; serta peningkatan mutu Lembaga Hisab Rukyat.



Kegiatan Pengukuran Arah Kiblat Musholla dan Kamar Hotel se Kabupaten Tuban

SK 16: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Nikah/Rujuk

Dalam peningkatan kualitas pelayanan nikah/rujuk terdapat beberapa indikator yang dijadikan tolok ukur antara lain revitalisasi KUA, peningkatan sarana prasarana KUA, kursus pra nikah bagi calon pengantin, bimbingan cegah kawin bagi usia remaja, dan pembinaan penghulu.



Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Nikah di Kota Probolinggo

SK 17: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Bimbingan Keluarga

Keluarga merupakan institusi sosial terkecil tetapi sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan dan perkembangan hidup manusia, terutama bagi anak-anak. Melalui keluarga yang baik dan harmonis maka akan menghasilkan generasi penerus yang baik pula.



Layanan Pusaka Sakinah di Kab. Jombang

SK 18: Meningkatnya Kualitas Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggara Ibadah Umrah Dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus

Sasaran ini terkait dengan tugas Kementerian Agama dalam hal penyelenggaraan haji dan umroh. Dalam sasaran ini terdapat satu indikator yakni Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi. Namun mengingat adanya pandemi covid 19 pemberangkatan jama'ah haji pada tahun 2021 ditunda dan kota Makkah dan Madinah ditutup untuk ibadah umroh bagi pengunjung luar Arab Saudi.



Kegiatan Diseminasi Terkait Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji Tahun 2021

SK 19: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendaftaran Ibadah Haji

Dalam sasaran kualitas

Beberapa hal yang menjadi faktor meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji adalah Pusat Layanan Haji yang memenuhi standar dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Memiliki SOP pelayanan
- b. Memiliki perangkat hardware dan jaringan untuk operasi siskohat
- c. Memiliki ruang penerimaan berkas haji
- d. Memiliki alat rekam biometric
- e. Memiliki ruang penyimpanan arsip

Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan adalah 100% mengingat belum berakhirnya pandemi Covid 19 yang dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) NO. 660 TAHUN 2021 Tentang Pembatalan Pemberangkatan Jamaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M.

SK 20: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Jamaah Haji di Asrama Haji

Salah satu hal yang mendukung meningkatnya kualitas pelayanan jamaah haji adalah asrama haji yang memenuhi standar pelayanan dengan kriteria memiliki tempat layanan untuk pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji ke dan dari embarkasi (Kepdirjen PHU 38/2017 tentang Juknis Pengelolaan Asrama Haji).

SK 21: Meningkatnya Kualitas Pembinaan Jamaah Haji

Sasaran meningkatnya kualitas pembinaan jamaah haji diukur melalui dua indikator yakni Persentase petugas haji yang profesional dan Persentase Jamaah Haji yang mengikuti manasik haji. Sebagaimana dengan sasaran terkait haji lainnya, maka sasaran ini juga tidak terlaksana dengan baik mengingat batalnya keberangkatan haji untuk tahun 2021

SK 22: Meningkatnya Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Haji Terpadu

Peningkatan pengelolaan data dan system informasi haji terpadu dapat ditingkatkan dengan :

- a. Layanan bisa diberikan setiap hari sepanjang tahun

- b. Memiliki fasilitas layanan PC, Bimoterik, dan jaringan yang memadai
- c. Memiliki SDM yang menangani siskohat

SK 23: Meningkatnya Pengelolaan Dan Pembinaan Pemberdayaan Dana Zakat

Sasaran kegiatan meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat ini diimplementasikan melalui dua indikator, yakni Persentase amil yang memiliki sertifikat kompetensi dan Persentase lembaga zakat yang dibina.



Seleksi Calon Pimpinan Baznas Kota Mojokerto

SK 24: Meningkatnya Pengelolaan Aset Wakaf

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum sesuai syariah.

Pada Sasaran Kegiatan meningkatnya pengelolaan aset wakaf terdapat tiga indikator yakni persentase lembaga wakaf yang dibina; persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan; dan persentase tanah wakaf yang bersertifikat.



Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur menyerahkan Keputusan Menteri Agama (KMA) tahap kedua Izin Tukar Menukar Harta Benda Wakaf terdampak Lumpur Lapindo.

SK 25: Meningkatnya Kualitas Penerapan Kurikulum Dan Pola Pembelajaran Inovatif

Pembelajaran inovatif adalah pembelajaran yang lebih bersifat *student centered*. Artinya, pembelajaran yang lebih memberikan peluang kepada siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan secara mandiri (*self directed*) dan dimediasi oleh teman sebaya (*peer mediated instruction*). Pembelajaran inovatif mendasarkan diri pada paradigma konstruktivistik. Pembelajaran inovatif biasanya berlandaskan paradigma konstruktivistik membantu siswa untuk menginternalisasi, membentuk kembali, atau mentransformasi informasi baru.

Adapun ciri-ciri dari pembelajaran inovatif yaitu sebagai berikut :

- a. Memiliki prosedur yang sistematis untuk memodifikasi perilaku siswa berdasarkan pada asumsi-asumsi tertentu.
- b. Hasil pembelajaran ditentukan secara khusus ialah perubahan perilaku positif siswa.
- c. Penetapan lingkungan pembelajaran secara khusus dan kondusif.
- d. Bisa menetapkan kriteria keberhasilan siswa setelah mengikuti pembelajaran.
- e. Model pembelajaran harus mendorong siswa aktif dan partisipatif terhadap apa yang terjadi dalam lingkungan belajar

SK 26: Meningkatnya Kualitas Penilaian Pendidikan

Sasaran kegiatan meningkatnya kualitas penilaian pendidikan diukur dengan menggunakan beberapa indikator yakni Persentase guru di madrasah yang dinilai kinerjanya; Persentase guru di sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya; Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya; Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/sekolah keagamaan; Persentase siswa madrasah yang mengikuti asesmen kompetensi; dan Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti asesmen kompetensi.

Kendala utama dari pemenuhan SK 26 adalah adanya pandemi Covid 19 sehingga proses belajar mengajar dilakukan secara online. Hal ini menyebabkan tidak optimalnya pemenuhan target dan indikator yang ditetapkan.



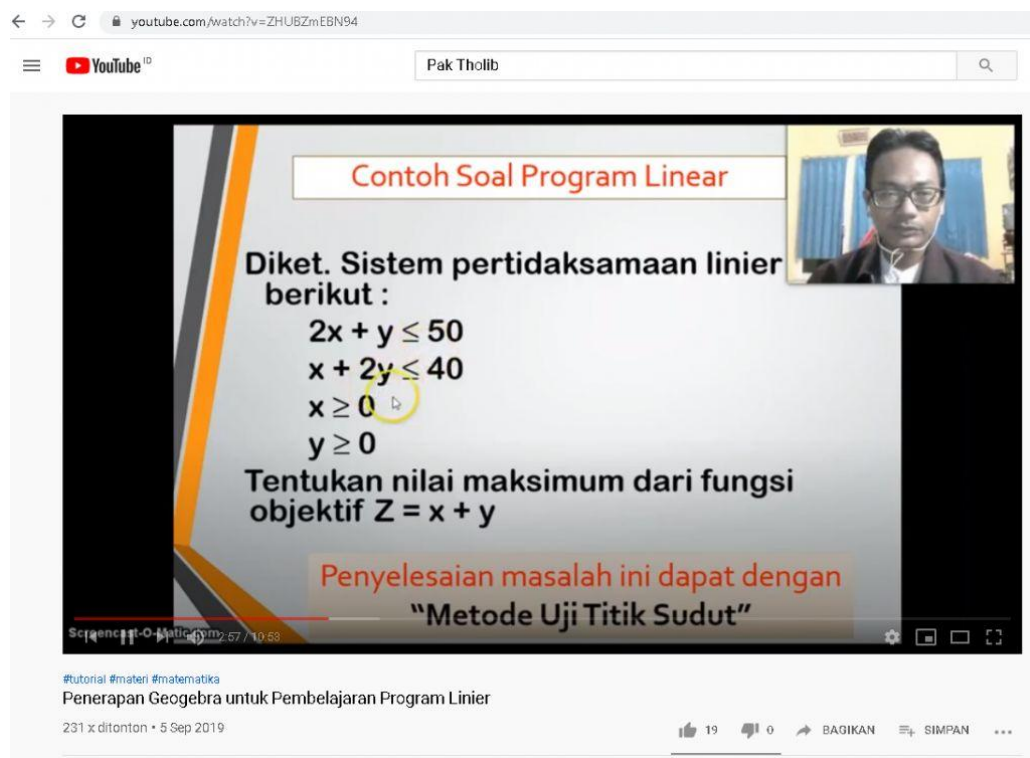
Penghargaan Bagi Guru Motivator Yang Masuk Tingkat Nasional di kab. Magetan

SK 27: Meningkatnya Penerapan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Sistem Pembelajaran

Tujuan akhir proses pendidikan nasional adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut upaya strategis yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Inti dari proses pendidikan secara formal adalah proses pembelajaran. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan upaya strategi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan proses pembelajaran. Pembelajaran yang berkualitas

dapat dilihat dari segi proses dan hasilnya. Banyak faktor yang berpengaruh atau mendukung terwujudnya proses pembelajaran yang berkualitas dalam mencapai tujuan pendidikan. Salah satunya adalah pemanfaatan teknologi dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Teknologi pembelajaran yang dewasa ini banyak diaplikasikan berupa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Pandemi Covid 19 telah memaksa dunia pendidikan merubah sistem pembelajaran. Karena keterpaksaan itulah saat ini hampir semua guru dan murid menerapkan teknologi informasi dan komunikasi melalui berbagai aplikasi seperti *zoom meeting*, *google meeting*, dan lain sebagainya.



Pembelajaran Secara Online Melalui Kanal Youtube Oleh Guru-Guru MAN 3 Jombang

SK 28: Meningkatnya Kualitas Sarana Dan Prasarana Pendidikan

Salah satu aspek yang seharusnya mendapat perhatian utama oleh setiap pengelola pendidikan adalah mengenai fasilitas pendidikan. Sarana pendidikan umumnya mencakup semua fasilitas yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, seperti: Gedung, ruangan belajar atau kelas, alat-alat atau media pendidikan, meja, kursi, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan fasilitas/prasarana adalah yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti: halaman, kebun atau taman sekolah, maupun jalan menuju ke sekolah.

Fasilitas pendidikan pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam empat kelompok yaitu tanah, bangunan, perlengkapan, dan perabot sekolah (*site, building, equipment, and furniture*). Agar semua fasilitas tersebut memberikan kontribusi yang berarti pada jalannya proses pendidikan, hendaknya dikelola dengan baik. Manajemen yang dimaksud meliputi: (1) Perencanaan, (2) Pengadaan, (3) Inventarisasi, (4) Penyimpanan, (5) Penataan, (6) Penggunaan, (7) Pemeliharaan, dan (8) Penghapusan.



Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Pembangunan Laboratorium dan Perpustakaan Dana SBSN di MAN 2 Kota Probolinggo oleh Direktur KSKK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia

SK 29: Meningkatnya Pemberian Bantuan Pendidikan Bagi Anak Kurang Mampu, Daerah Afirmasi, Dan Berbakat

Sasaran kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan bantuan-bantuan pendidikan sehingga setiap anak didik bisa merasakan pemerataan akses pendidikan. Dalam Sasaran kegiatan ini terdapat beberapa indikator yakni Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah; Jumlah siswa sekolah keagamaan penerima BOS; Persentase siswa madrasah penerima PIP; Persentase siswa sekolah keagamaan penerima PIP; Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional..



Sosialisasi Dana BOS Madrasah di Kab. Trenggalek dengan Narasumber dari Kejaksaan Negeri Trenggalek dan Kantor Perpajakan

SK 30: Meningkatnya Kualitas Penanganan ATS

Penanganan Anak Tidak Sekolah dalam sasaran kegiatan ini dilakukan dengan memenuhi dua indikator yakni Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif dan Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren.



Sosialisasi Pendidikan Inklusif di Kota Pasuruan

SK 31: Menguatnya Pelayanan 1 Tahun Prasekolah

Pendidikan prasekolah sangat penting bagi pembangunan mental psikis dan kemampuan bersosialisasi anak. Anak yang mendapatkan pendidikan prasekolah cenderung berhasil melewati setiap jenjang pendidikan formal. Dengan kata lain anak-anak yang pernah mengenyam pendidikan prasekolah memiliki peluang yang besar untuk berhasil ditahap pendidikan sekolah dasar.

Pengertian Pendidikan prasekolah adalah pendidikan yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, baik melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal. Dalam UU RI No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, dijelaskan bahwa pendidikan prasekolah atau Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Sasaran kegiatan memiliki satu indikator sasaran kegiatan yaitu Jumlah siswa RA/Taman Seminari/ Pratama Widya Pasraman/ Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP.



Kelompok Kerja Guru Raudhatul Athfal (KKGRA) Kota Malang Adakan Pelatihan Pembuatan Penelitian Tindakan Kelas (PTK)

SK 32: Meningkatnya Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Sasaran kegiatan meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan memiliki beberapa indikator sasaran yang harus dipenuhi antara lain Persentase guru madrasah dan ustadz pendidikan diniyah/muadalah yang lulus sertifikasi; Persentase tenaga kependidikan madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi; Persentase kepala madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi; dan Persentase ustad pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG.



Kegiatan Asesmen Kompetensi Guru (AKG), Asesmen Kompetensi Kepala (AKK) dan Asesmen Kompetensi Pengawas (AKP) di Kab. Trenggalek

SK 33: Terpenuhinya Jumlah Guru Dan Tenaga Kependidikan Sesuai Dengan Standar Minimal

Guru merupakan salah satu elemen penting dalam mengukur keberhasilan dunia pendidikan. Guru dan tenaga kependidikan harus memiliki standar kompetensi minimal sehingga mampu menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Dalam Sasaran Kegiatan tersebut terdapat beberapa indikator antara lain Persentase guru sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal; Persentase tenaga kependidikan lainnya di sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal; dan Persentase guru pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal.

SK 34: Meningkatnya Kualitas Pendidikan Profesi Guru Melalui Peningkatan Kualifikasi Pendidik

Sasaran kegiatan ini diukur dengan dua indikator yakni Persentase Guru Pendidikan Agama Islam, Ustadz Pendidikan Diniyah/Muadalah, Guru Madrasah, Guru Sekolah Keagamaan yang mengikuti PPG; dan Persentase Guru Pendidikan Agama Islam, Ustadz Pendidikan Diniyah/Muadalah berkualifikasi minimal S1. Untuk Jawa Timur capaian kinerja atas indikator diatas adalah 91% dan 92%.

SK 35: Meningkatnya Pemenuhan Dan Distribusi Tenaga Pendidik Berbasis Kebutuhan

Sasaran kegiatan ini diturunkan dalam dua indikator yakni Persentase guru/tenaga pendidikan di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus; dan Persentase guru pendidikan agama Islam di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus.

SK 36: Menguatnya Kapasitas Dan Akselerasi Akreditasi

Akreditasi merupakan proses evaluasi dan penilaian layak tidaknya sebuah institusi yang dilakukan secara berkesinambungan. Jadi bisa diartikan juga sebagai proses evaluasi dan penilaian terhadap mutu serta kualitas yang

dilakukan pada penyelenggara pendidikan tersebut. Akreditasi pendidikan merupakan salah satu upaya yang dilakukan agar mutu pendidikan bisa terukur dengan jelas.

Sasaran kegiatan tersebut memiliki dua indikator yakni Jumlah madrasah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi; dan Jumlah sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi berdasarkan hasil pemetaan.



Visitasi Daring Akreditasi di MTsN 4 Sidoarjo oleh Asesor BAN-S/M

SK 37: Meningkatnya Budaya Mutu Pendidikan

Budaya Mutu merupakan sistem nilai dari sebuah organisasi yang menghasilkan keadaan lingkungan yang kondusif dalam pembentukan perbaikan yang berkelanjutan dalam segi mutu. Budaya Mutu terdiri dari nilai-nilai, tradisi, prosedur, dan harapan yang mengedepankan mutu.

Adapun budaya mutu pendidikan adalah nilai (kesiapan, komitmen, sikap, kebiasaan) dan keyakinan satuan pendidikan yang menghasilkan lingkungan kondusif untuk keberlangsungan dan keberlanjutan perbaikan mutu.

Pada sasaran ini terdapat empat indikator yang harus dipenuhi yakni Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu; Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu; Persentase siswa madrasah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional; dan Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional.



Jawa Timur meraih juara umum dalam ajang Kompetis Sains Madrasah (KSM) Tahun 2021

SK 38: Meningkatnya Budaya Belajar Dan Lingkungan Madrasah/Sekolah Yang Menyenangkan Dan Bebas Dari Kekerasan

Budaya belajar adalah ciptaan manusia yang tampak sebagai perilaku mengenai belajar, digunakan oleh seseorang atau kelompok orang untuk menampakkan tindakan dan perbuatan dalam lingkungan sekolah. Dalam sasaran kegiatan ini terdapat beberapa indikator antara lain Persentase madrasah yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran; Persentase sekolah keagamaan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran; Persentase kepala pendidikan diniyah/muadallah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman; Persentase madrasah yang ramah anak; dan Persentase sekolah keagamaan yang ramah anak.



MI Ma'arif Hidayatul Ula Kota Probolinggo menggelar Deklarasi Madrasah Ramah Anak

SK 39: Meningkatnya Kepeloporan Dan Kesukarelawanan Pemuda Dan Pengembangan Pendidikan Kepramukaan

Pendidikan Kepramukaan adalah proses pendidikan yang melengkapi pendidikan di lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan menerapkan prinsip dasar Kepramukaan dan metode pendidikan Kepramukaan. Sasaran akhir dari Pendidikan Kepramukaan adalah terbentuknya kepribadian watak, akhlak mulia, dan memiliki kecakapan hidup.



Pelantikan 286 Anggota Pramuka Pengalang di MTSN 2 Mojokerto

SK 40: Meningkatnya Kualitas Layanan Dan Bantuan Hukum

Dalam sasaran kegiatan ini terdapat tiga indikator yakni Persentase produk hukum yang diterbitkan; Persentase kasus hukum yang terselesaikan; dan Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan.



Pembinaan Hukum Pengendalian Gratifikasi di Kantor Kementerian Agama Kab. Sumenep

SK 41: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kerjasama Luar Negeri

Sasaran kegiatan ini memiliki satu indikator yakni Persentase rekomendasi izin orang asing.

SK 42: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan ASN (Pengadaan, Penempatan, Pembinaan Dan Pengembangan Pegawai)

Manajemen ASN adalah kegiatan untuk memperoleh sumber daya ASN yang berkualitas, profesional dan bersih dalam mewujudkan penyelenggaraan tugas pelayanan umum (*public service*) dan pelaksanaan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut ASN merupakan kunci utama reformasi birokrasi agar dapat menampilkan kemampuan pelayanan yang optimal dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam sasaran ini indikator yang menjadi tolok ukur antara lain Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja; Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti; Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan; Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71); Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya; Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu; Persentase data ASN yang diupdate; dan Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses.



54 CPNS menerima SK CPNS di Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jatim

SK 43: Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Keuangan Yang Tertib Sesuai Dengan Ketentuan

Manajemen Keuangan Pemerintah adalah pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sumber-sumber keuangan berupa pendapatan negara, terhadap belanja negara dan sumber keuangan untuk menutupi membiayai kekurangan yang mungkin timbul. Pada dasarnya keuangan yang dikelola oleh pemerintah merupakan keuangan negara. Dalam hal ini keuangan yang dikelola oleh pemerintah adalah keuangan yang bersumber dari APBN.

Pendapatan negara bisa berasal dari berbagai sumber yakni dari pajak dan bukan pajak yang menurut peraturan perundangan memang menjadi wewenang pemerintah. Belanja pemerintah pada hakekatnya dilakukan dalam rangka melaksanakan fungsinya mensejahterakan masyarakat. Sedangkan, sumber-sumber keuangan untuk pembiayaan pembangunan dapat berasal dari hutang atau sumber lainnya. Adapun tujuan pengelolaan keuangan Negara adalah sebagai berikut :

- a. Mempengaruhi pertumbuhan ekonomi
- b. Menjaga stabilitas ekonomi

- c. Merealokasi sumber-sumber ekonomi
- d. Mendorong Re-distribusi Pendapatan

Dalam mendukung sasaran kegiatan peningkatan pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan, Kanwil Kementerian Agama Prov Jatim selalu memantau pelaporan keuangan pada semua satker di bawah Kanwil Kementerian Agama Jatim sehingga laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar dan tepat waktu.

SK 44: Meningkatnya Pengelolaan BMN Yang Akuntabel

Barang Milik Negara (BMN) ini merupakan aset Negara yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah yang dibatasi penggunaannya, digunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kementerian, dimana pengelolaan Barang Milik Negara ini meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dengan tujuan mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN dengan sasaran.

- a. Semua barang milik Negara tercatat dengan baik
- b. Semua aktivitas dalam rangka pengelolaan BMN dapat dilakukan dengan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas serta kepastian nilai.
- c. Nilai/ data BMN untuk kebutuhan laporan manajemen sebagai bahan penyusunan neraca pemerintah pusat sudah 2 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara menggambarkan jumlah, kondisi dan nilai BMN yang wajar

SK 45: Meningkatnya Kualitas Penataan Dan Penguatan Manajemen Organisasi

manajemen organisasi adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan sumber daya organisasi, yang mana setiap orangnya memiliki tugas, peran dan fungsi penting untuk mencapai tujuan organisasi. Secara umum manajemen organisasi memiliki tujuan antara

lain untuk Membentuk koordinasi yang baik antar divisi maupun individu; membentuk kinerja sumber daya yang lebih efektif melalui pemberian rasa aman dan kesatuan diantara pegawai; serta menciptakan suasana lingkungan kerja yang damai dan positif.

Dalam sasaran kegiatan diatas terdapat tiga indikator yang harus dipenuhi yakni Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis; Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi; dan Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti.

SK 46: Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dimana uang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Adapun visi reformasi birokrasi yang tercantum dalam lembaran Grand design Reformasi Birokrasi Indonesia adalah terwujudnya pemerintahan kelas dunia. Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pemerintahan kelas dunia, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan pada abad ke 21 melalui tata pemerintahan yang baik pada tahun 2025.

Sedangkan Misi reformasi birokrasi Indonesia adalah

- a. Membentuk/ menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

- b. Melakukan penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana, manajemen sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, mindset, dan cultural set.
- c. Mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif.
- d. Mengelola sengketa administrasi secara efektif dan efisien.

SK 47: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Dan Anggaran

Sasaran kegiatan ini diukur dengan tiga indikator antara lain Persentase output perencanaan yang berbasis data; Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra; dan Persentase Perencanaan Kerjasama Yang Ditindaklanjuti.



Penandatanganan Perkin Ka. Kankemenag Kabupaten/Kota dengan Ka. Kanwil Kemenag Prov. Jatim

SK 48: Meningkatnya Kualitas Pemantauan Dan Evaluasi Perencanaan Dan Anggaran

Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran, Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Timur berpedoman pada KMA 94 Tahun 2021. Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai

dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa yang akan datang.

Fokus utama evaluasi diarahkan kepada keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), dan dampak (*impacts*) dari pelaksanaan rencana pembangunan. Oleh karena itu, dalam perencanaan yang transparan dan akuntabel, harus disertai dengan penyusunan indikator kinerja pelaksanaan rencana, yang sekurang-kurangnya meliputi : (i) indikator masukan, (ii) indikator keluaran, dan (iii) indikator hasil/manfaat.

Di dalam pelaksanaannya, kegiatan evaluasi dapat dilakukan pada berbagai tahapan yang berbeda, yaitu :

- a. Evaluasi pada Tahap Perencanaan (*ex-ante*), yaitu evaluasi dilakukan sebelum ditetapkan rencana pembangunan dengan tujuan untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya;
- b. Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan (*on-going*), yaitu evaluasi dilakukan pada saat pelaksanaan rencana pembangunan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya; dan
- c. Evaluasi pada Tahap Pasca-Pelaksanaan (*ex-post*), yaitu evaluasi yang dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir, yang diarahkan untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/hasil/dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini digunakan untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program.

SK 49: Meningkatnya Kualitas Sarana Dan Prasarana Kantor

Sasaran Meningkatnya Kualitas Sarana Dan Prasarana Kantor hanya memiliki satu indikator yakni Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar



Sarana Ruangan PTSP Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

SK 50: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Tata Persuratan, Arsip Dan Layanan Pengadaan Barang Jasa

Dalam sasaran kegiatan ini terdapat lima indikator yang dijadikan ukuran yakni Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu; Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik; Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen; Persentase menurunnya lelang gagal; dan Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding.

Dalam layanan tata persuratan Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jatim telah meluncurkan aplikasi tata persuratan bernama SINADINE (Sistem Informasi Naskah Dinas Elektronik). Melalui aplikasi ini penomoran surat tidak lagi menggunakan cara manual tapi diupload dan mendapatkan tandatangan secara online.

sinadine.kemenagjatim.id/kanwil/suratmasuk

Si-NaDinE > Surat Masuk

Data Surat Masuk

data ke 1 s.d 10 dari total 29 data

Pilih...

NO.	PENGIRIM / PERIHAL	NOMOR SURAT / TANGGAL SURAT	JENIS DISPOSISI / KEAMANAN	PEREKAM / PENGUBAH	FILE
998	sekertariat jenderal kemenag RI undangan sosialisasi pada hari rabu 2 februari 2022 pukul 09.00-12.00 melalui zoom meeting	B-0467/SJ/B.IV.4/OT.00/01/2022 2022-01-27	penting Biasa	Rizki Amalia Oktaviana, A.Md	download

Taufik Kurahman-

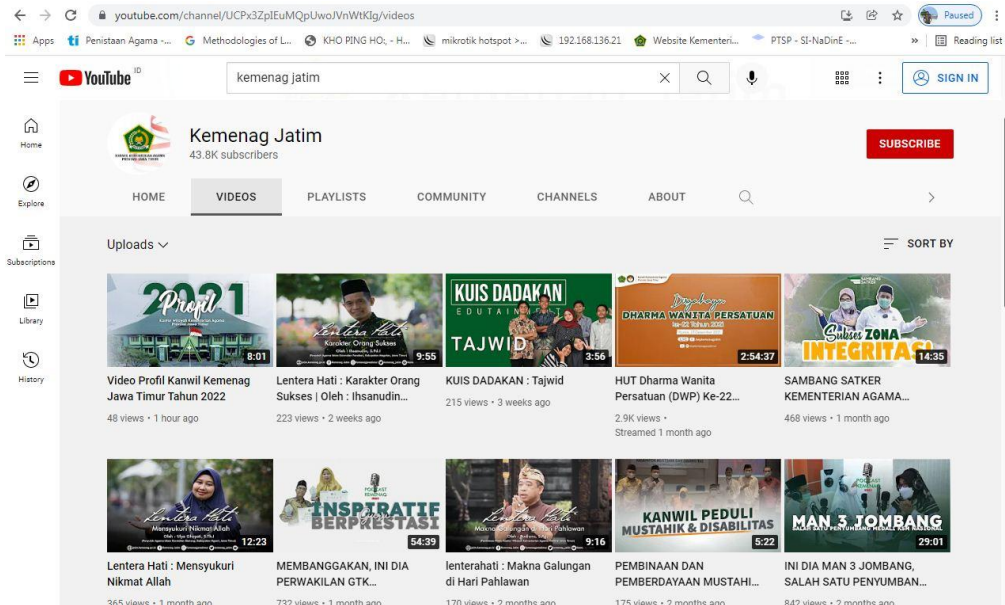
Tampilan Data Surat Masuk Dalam Aplikasi SINADINE Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Timur

SK 51: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Dan Rumah Tangga

Sasaran kegiatan Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga diimplemmentasikan dalam satu indikator saja yakni Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan.

SK 52: Meningkatnya Kualitas Layanan Hubungan Masyarakat Dan Informasi.

Dalam membangun hubungan yang baik dengan masyarakat suatu instansi perlu meningkatkan kualitas layanan dan informasi publik. Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim menggunakan berbagai macam media untuk menyampaikan informasinya baik melalui web, instagram, facebook, twitter, dan media-media lainnya.



Tampilan Kanal Youtube Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

SK 53: Meningkatnya Kualitas Data Dan Sistem Informasi

Data dan informasi yang valid merupakan hal yang mendasar dalam perumusan kebijakan yang baik dan tepat sasaran. Untuk membuat kebijakan diperlukan informasi yang berkualitas tinggi. Informasi yang memiliki kualitas tinggi akan menentukan sekali efektivitas kebijakan publik. Syarat-syarat informasi yang baik antara lain adalah:

- Ketersediaan availability. Syarat pokok bagi suatu informasi adalah tersedianya informasi itu sendiri. Informasi harus dapat diperoleh bagi yang hendak memanfaatkannya.
- Mudah dipahami. Informasi harus mudah dipahami oleh pembuat kebijakan.
- Relevan. Informasi yang diperlukan harus benar-benar relevan dengan permasalahannya.
- Bermanfaat. Terkait dengan syarat relevansi, informasi harus bermanfaat bagi pembuat kebijakan.
- Tepat waktu. Informasi harus tersedia tepat waktunya, terutama apabila pembuat kebijakan ingin segera memecahkan masalah yang dihadapi oleh pemerintah.
- Keandalan Reliability. Informasi harus diperoleh dari sumber-sumber yang dapat diandalkan kebenarannya.

- g. Akurat. Informasi seyogyanya bersih dari kesalahan, harus jelas dan secara tepat mencerminkan makna yang terkandung dari data pendukungnya.
- h. Konsisten. Informasi tidak boleh mengandung kontradiksi dalam penyajiannya.

Sasaran kegiatan Meningkatnya Kualitas Data Dan Sistem Informasi hanya memiliki satu indikator yakni Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan *reliable*.

SK 54: Meningkatnya Kualitas Administrasi Pendidikan Keagamaan

Pendidikan keagamaan adalah pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

Dalam menjalankan pendidikan keagamaan juga diperlukan administrasi pendidikan yang baik dan selaras. Administrasi Pendidikan adalah sebuah proses kerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan dengan melihat hubungan antar komponen pendidikan sehingga dapat memperbaiki sistem pendidikan dengan menggunakan perangkat yang mendukung kegiatan pembelajaran.

Dalam melaksanakan sasaran kegiatan ini terdapat empat indikator yakni Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional; Jumlah dokumen penyusunan rencana program dan anggaran, keuangan, kepegawaian; Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang disediakan; dan Jumlah layanan umum dan perlengkapan.

C. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasinya yang menunjukkan ketaatan terhadap peraturan dan ketentuan perundang-undangan. Adapun realisasi anggaran untuk Kantor Kementerian Agama Prov Jatim adalah sebagai berikut:

Tabel
Realisasi Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

NO	KODE	SATKER	PAGU Rp	REALISASI	
				Rp	%
1	417800	Setjen	20.709.628.000	20.476.007.188	98,87%
2	417801	Bimas Islam	11.488.272.000	10.688.017.005	93,03%
3	417802	Pendis	1.575.478.169.000	1.573.508.894.759	99,88%
4	417803	Bimas Kristen	10.067.482.000	9.984.239.970	99,17%
5	417804	Bimas Katolik	13.484.842.000	13.190.529.366	97,82%
6	417805	Bimas Hindu	9.441.913.000	9.340.660.654	98,93%
7	417806	Bimas Buddha	9.495.172.000	9.493.129.115	99,98%
8	417807	PHU	10.805.346.000	10.478.796.722	96,98%
TOTAL			1.660.970.824.000	1.657.160.274.779	99,77%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur ini menggambarkan capaian kinerja selama Tahun 2021 dalam mendukung visi dan misi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Keberhasilan maupun kegagalan capaian kinerja ini tidak terlepas dari dukungan seluruh pihak. Keberhasilan yang sudah ada menjadi pijakan untuk Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur agar dapat menunaikan tugas dan mencapai kinerja lebih baik kedepannya. Penyerapan anggaran mencapai 99,77% dari total pagu anggaran. Laporan Kinerja ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja serta perbaikan di periode-periode yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 ini disusun agar dapat memberikan manfaat untuk Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur pada khususnya dan Kementerian Agama pada umumnya.